

PROSPEK DAN KENDALA KUR DALAM MENDUKUNG PERKUATAN PERMODALAN UMKM UMKM **

Oleh ; Teuku Syarif **)

I. PENDAHULUAN

Senin 5 November 2007 Presiden SBY meresmikan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program yang sangat populis ini bertujuan mengatasi masalah kesulitan kalangan Usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) untuk mengakses permodalan dari perbankan. Dengan perkataan lain program penjaminan kredit koperasi dan UMKM oleh pemerintah ini ditujukan untuk memperkuat permodalan kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi. Program KUR didukung oleh enam bank pelaksana atau penyalur yaitu Bank umum (BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri dan Bukopin), serta dua perusahaan penjaminan (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia). Pada tahun 2011 sekarang ini penyaluran akan diperkuat dengan ikut berperannya semua Bank Pembangunan Daerah (BPD). Selama tiga tahun pelaksanaan KUR, sampai dengan tanggal 26 Desember tahun 2010 Menteri Koperasi dan UKM mengatakan penyaluran KUR secara kumulatif selama 3 tahun terakhir sudah mencapai Rp 30,6 Triliun atau, melebihi dari target yang diharapkan. Sedangkan dari aspek jumlah UMKM yang menjadi nasabah dilaporkan bahwa per tanggal 26 Desember 2010 telah mencapai 3,6 juta orang, dengan demikian per nasabah telah mendapatkan pinjaman sebesar Rp 8,334 juta

-
- 1) *Disampaikan dalam acara diskusi rutin pemberdayaan Koperasi dan UKM Kalangan Peneliti dan pejabat struktural di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM tanggal 7 Januari 2011*
 - 2) *Ir.Teuku Syarif.MS adalah Peneliti Utama pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya dan UKM dan Koperasi, Kementerian Negara Koperasi dan UKM*

Untuk mendukung pelaksanaan program KUR ini pemerintah, telah mengalokasikan dana dari APBN sebanyak Rp 2,0 Triliun Rupiah yang dititipkan pada kedua perusahaan penjaminan tersebut. Dari aspek penjamin diasumsikan **Gearing Ratio** sebesar 10 kali, akam mampu disalurkan Rp20 triliun Dengan demikian kemampuan penyaluran sebesar 30.6 Triliun tersebut nampaknya telah melampaui target, atau telah mencapai gearing ratio sebesar 15,03 kali.

Penilaian dari berbagai aspek tersebut diatas menunjukkan bahwa program cukup efektif dalam memperkuat permodalan UMKM. Namun perlu juga diperhatikan bahwa tolok ukur keberhasilan suatu program perkredit tidak hanya dari aspek kemampuan penyaluran dan efektifitas pemanfaatan dana secara finansial, karena masih banyak tolok ukur lainnya yang belum dikaji seperti ; kemampuan pengembalian dan pemanfaatan pinjaman oleh peminjam.

II. PERMASALAHAN

Sama seperti berbagai program pemerintah dibidang perkreditan lainnya, dari aspek jumlah dana yang tersalur dan jumlah nasabah yang mendapatkan pinjaman, program KUR telah berhasil melampaui target. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah masih adanya berbagai isu dan sinyalermen yang menyatakan bahwa program ini masih sulit di akses karena kalangan bank penyalur masih mensyaratkan adanya agunan yang cukup besar. Untuk mengatasi masalah tersebut memang telah diambil kebijakan antara lain dengan menaikkan jaminan pemerintah oleh lembaga penjaminan dari 70 % menjadi 80 %. Demikian juga telah dilakukan pengelompokan peminjam menjadi dua kelompok yaitu kredit untuk usaha mikro sampai dengan Rp 20 juta yang tidak memerlukan agunan dan kredit diatas 20 juta sampai dengan 500 juta yang tadinya memerlukan agunan 30 % akan diturunkan menjadi 20 %.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh kementerian Negara Koperasi dan UMKM tahun 2006 memperkirakan kebutuhan kredit per unit UMKM sebesar Rp 3.870.000 untuk usaha mikro, Rp 148,54 juta untuk usaha kecil dan Rp 1,241

miliar untuk usaha menengah. Rata-rata kebutuhan UMKM adalah sebesar Rp 6,81 juta, sehingga total kebutuhan kredit Untuk UMKM yang diperkirakan sekarang ini jumlahnya mencapai lebih dari 49 juta, adalah sebesar Rp 333,70 Triliun. Sampai dengan akhir Desember tahun 2010 penyakuran KUR sudah mencapai 30,6 triliun. Jumlah ini memang terlihat cukup besar dan sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu Rp 30 Triliun. Namun dengan asumsi 87,34 % UMKM memerlukan pinjaman modal, jumlah tersebut nampaknya baru 9,17 persen dari kebutuhan kredit UMKM. Demikian juga jumlah orang yang mendapatkan kredit yaitu nasabah KUR sebanyak lebih kurang 3,6 juta orang. Jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan jumlah UMKM yang membutuhkan pinjaman. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian negara koperasi dan UKM tahun 2006 yang menyatakan bahwa jumlah UMKM yang membutuhkan kredit ada sebanyak 87,34 % dari jumlah UMKM yang ada di Indonesia atau sekitar 42,796 juta unit usaha. Dengan demikian jumlah nasabah yang tercover dengan program KUR sebanyak 3,6 juta orang baru 8,4 % dari jumlah UMKM yang membutuhkan pinjaman

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program KUR khususnya dalam pengembangan penyaluran KUR menurut Achmad Junaidi (2010) antara lain :

1. Tidak semua bank pelaksana memiliki kantor atau outlet yang mudah dijangkau oleh UMKM
2. Masih banyak petugas bank yang sering meminta agunan tambahan yang berlebihan, meskipun KUR pada perinsipnya sudah dijamin oleh perusahaan penjaminan
3. Biaya transaksi kredit masih dianggap terlalu tinggi terutama untuk kredit dengan pinjaman kecil-kecil
4. Ketidaksiapan UMKM untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan
5. Keterbatasan fasilitas penjaminan yang dikaitkan dengan ketentuan gearing rasio sebesar 10 %
6. Bunga kredit KUR masih dianggap terlalu tinggi oleh kalangan UMKM

7. Penempatan dana pada SBI sering kali lebih menarik bagi bank dibandingkan dengan penyaluran kredit kepada UMKM
8. Keterbatasan jumlah dan kualitas petugas pendamping kredit /BDS/KKMB dalam membantu UMKM dalam mengakses kredit
9. Rendahnya peran serta aparat pemerintah dalam menyiapkan calon debitur

Di samping sembilan masalah tersebut ada isu tentang pengalihan kredit mikro untuk keperluan konsumtif kedalam program KUR. Demikian juga jika diperhatikan lebih jauh KUR masih menyimpan banyak masalah mendasar lainnya dari berbagai aspek senbagai berikut :

1. Pengembalian pinjaman

Walaupun program KUR sudah dilaksanakan lebih dari 3 tahun, namun sampai hari ini belum ada data kongkrit yang berkaitan dengan pengembalian pinjaman dan tunggakan program KUR.

2.Pemanfaatan Pinjaman KUR

Dari aspek pemanfaatan pinjman juga belum pernah dilakukan evaluasi apakah penyaluran KUR sudah tepat sasaran dan sudah dimanfaatkan oleh para peminjam dengan baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan beberapa tolok ukur antara lain : 1) Persentase Penggunaan pinjaman untuk kegiatan produktif ; 2) Kenaikan omset atau volume usaha peminjam ; 3) kenaikan laba dari peminjam : Kenaikan jumlah penyerpan tenaga kerja dari unit usaha peminjam.

III. POTENSI PENGEMBANGAN KUR

Potensi Pengembangan program KUR dapat dilihat dari beberapa aspek

1. Permintaan Kredit Dari Kalangan UMKM

Data dari Kemeneterian Koperasi dan UKM per tanggal 1 Agusstus tahun 2010 memperlihatkan bahwa jumlah unit UMKM sekarang telah mencapai lebih kurang 49 juta unit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Deputi Bidang pengkajian Sumberdaya Koperasi dan UKM tahun 2006 menunjukkan bahwa

87,34 % atau 42,796 juta UMKM membutuhkan pinjaman dana untuk memperkuat permodalan dalam rangka mengembangkan usahanya. Sesuai dengan hasil penelitian tersebut yang memperkirakan kebutuhan kredit rata-rata per UMKM sebesar Rp .6,81 juta maka permintaan kredit dari kalangan mencapai Rp 291,44 Trililiun. Sedangkan jumlah penyaluran KUR selama tiga tahun terakhir baru sebesar Rp 30,6 atau 10, 40 dari kebutuhan pinjaman untuk UMKM. Dengan demikian masih dipelukan lagi pengembangan penyaluran KUR sebesar Rp 260,84 triliun untuk 30,196 juta unit usaha UMKM. Dengan tambahan dana untuk sejumlah UMKM yang belum pinjaman tersebut program KUR baru betul-betul menjadi program pemerintah yang mampu mengembangkan usaha UMKM dalam rangka membangun Perekonomian nasional.

2. Podel Pelaksanaan KUR

Beberapa aspek pola pelaksanaan KUR yang menjadikan program ini layak untuk dikembangkan dalam rangka mendukung perkuatan permodalan UMKM antara lain :

1). Adanya jaminan dari Pemerintah dan rendahnya bunga kredit

KUR merupakan satu-satunya program perkreditan yang dirancang berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di lapang yaitu kesulitan mengakses kredit, karena rendahnya pemilikan asset UMKM untuk dijadikan agunan. Dengan perkataan lain pemerintah baru kali ini menyadari bahwa penyerapan kredit program lebih disebabkan oleh ketidakmampuan kalangan UMKM untuk memenuhi persyaratan kredit dari pada tingkat bunga (Interes rate) yang ditetapkan oleh perbankan. Mitos bahwa UMKM tidak mampu membayar tingkat bunga bank komersial yang dinilai relatif tinggi tidak lagi digunakan dalam merancang program KUR karena berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat yang mampu dibayar oleh UMKM relatif cukup tinggi. Kemampuan UMKM untuk membayar bunga bank komersial yang selama ini dinilai masih tinggi terkait klangsung dengan margin usaha kalangan UMKM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Deputi bidang pengkajian Sumberdaya UMKM dankoperasi tahun 2006 melapotrkan bahwa margin usaha UMKM berkisar antara 48,6 % untuk

kegiatan di sektor tanaman pangan sampai dengan 568,7 % untuk kegiatan di sektor jasa kemasyarakatan atau sektor informal. Rata-rata margin yang diperoleh UMKM khususnya usaha mikro adalah sebesar 58,32 %. Sedangkan usaha kecil adalah sebesar 46,2 %. Dari aspek biaya produksi rata-rata biaya yang boleh digunakan membayar bunga kredit adalah sebesar 34 % dari total biaya produksi. Dengan demikian rata-rata bunga kredit yang mampu dibayar oleh kalangan usaha mikro adalah sebesar 34,6 % per tahun sedangkan untuk usaha kecil sebesar 27,8 % per tahun. Hasil pengamatan ini jelas membuktikan bahwa rata-rata bunga kredit perbankan srkarang ini yang berkisar antara 14 sampai dengan 24 % masih layak dimanfaatkan oleh kalangan UMKM. Dengan demikian bunga kredit KUR berkisar antara 14 sampai dengan 22 % masih layak Adanya pendapat bahwa bunga kredit KUR relatif tinggi bisa dinilai sebagai sikap tendensius yang tidak didasarkan pada fakta lapangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam program KUR sebenarnya tidak ada masalah dengan bunga kredit, atau dengan perkataan tingkat bunga kredit KUR bukan variable yang secara signifikan memengaruhi kemampuan penyaluran program kredit tersebut.

2). Prosedur Penyaluran Relatif Mudah

Prosedur penyaluran KUR tidak melibatkan banyak pihak, kaena KUR merupakan kredit komersial yang sebagian jaminan ditanggung pemerintah melalui perusahaan penjaminan. Bank sebagai pemilik uang dan sebagai eksekutor kredit dalam menyalurkan kredit tidak terikat atau perlu meminta rekomendasi dari pihak manapun. Bank langsung dapat memutuskan pemberian kredit berdasarkan kelayakan usaha yang akan dilaksanakan (Feasiblelity) dan kelayakan pengusaha sebagai debitur (Bankablelity). Dengan dengan demikian prosedurnya relatif mudah dan dapat diselesaikan dalam wakru cepat. Hal ini akan mengurag biaya penyaluran kredit dari perbankan (Cost of credit) yang secara bisa mempengaruhi penurunan suku bunga kredit (Rate of interest)

3). Bersifat kredit umum (Serba usaha)

Pinjaman KUR dapat digunakan untuk berbagai keperluan produktif atau kredit serba usaha yang tidak terikat untuk mendukung suatu kegiatan program pemerintah. Hal ini juga menjadi salah satu ciri khusus dari program KUR yang membedakan dari berbagai program perkreditan yang bersumber dari pemerintah sejak era tahun tujuh puluhan yang lalu. Dengan perkotaan lain KUR juga merupakan program terobosan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan kalangan UMKM. Dengan ketentuan ini KUR terbukti mendapat respon positif dari kalangan UMKM, sedangkan faktor yang membatasi kemampuan KUR adalah program itu sendiri bisa dikatakan masih dalam skala percobaan sehingga pemerintah baru mengalokasikan dana untuk penjaminan program tersebut sebesar 2 Triliun Rupiah atau kurang lebih 0,2 persen dari APBN.

3. Ketersediaan Infra Struktur

KUR dilaksanakan oleh 6 Bank nasional baik BUMN maupun bank milik swasta, dibantu oleh 13 Bank Pembangunan Daerah. Dengan jumlah Bank yang melaksanakan program KUR tersebut diseluruh Indonesia diprediksikan sekarang ini terdapat 36.276 unit kantor cabang atau kantor kas pembantu yang siap melayani penyaluran program KUR. Dengan semakin berkembangnya dunia pernakan yang mulai menjangkau pelosok-pelosok desa, nampaknya masalah ketersediaan tempat-tempat pelayanan KUR bagi UMKM bukan lagi menjadi kendala yang perlu ditakutkan. Kalaupun masalah ini masih ada tetapi sifatnya kedaerahan dan sementara sehingga menjadi kendala yang pengaruhnya signifikan.

IV. PROSPEK PENGEMBANGAN KUR

1. Prospek Pengembangan

Harus diakui bahwa Program KUR merupakan kebijaksanaan pemerintah yang sangat berpihak kepada masyarakat kelas bawah. Program ini merupakan satu kejutan dalam kondisi kegamangan dari kelompok UMKM dalam menghadapi persaingan bebas yang menuntut efisiensi, sedangkan kemampuan

mereka untuk meningkatkan skala usaha dibatasi kendala permodalan. KUR juga merupakan peningkatan pangsa kredit untuk UMKM, yang merupakan cermin keinginan untuk mewujudkan keadilan ekonomi, yang ditunjukkan oleh keadilan dalam pemberian kredit perbankan. Penetapan batas pinjaman sampai dengan Rp 500 juta juga nampak merupakan suatu kemajuan yang cukup meyakinkan, karena jumlah tersebut sudah cukup memadai bagi para pengusaha menengah.

Target jumlah penyaluran yang relatif kecil dibandingkan dengan jumlah UMKM, maupun besarnya batasan maksimal pinjaman bukanlah masalah yang perlu diperdebatkan. Yang perlu diperhatikan sekali lagi dalam hal ini adalah sudah terlihatnya keinginan yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memberdayakan UMKM dan Koperasi melalui usaha menciptakan keadilan ekonomi, dalam memanfaatkan sumberdaya modal. Permasalahan yang lebih perlu didiskusikan pada : 1) Penambahan kantor atau outlet yang mudah dijangkau oleh UMKM ; 2) konsistensi atau kedisiplinan bank pelaksana dalam meminta agunan tambahan ; 3) Penekanan biaya transaksi melalui peningkatan efisien 4).Ketidaksiapan UMKM untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan ; 5) Tambahan dana penjaminan dari pemerintah yang dikaitkan dengan ketentuan gering rasio sebesar 10 %. 6) Pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah terhadap bank-bank pelaksana agar tidak berlebihan dalam menempatkan dana pada SBI ; 7) Peningkatan jumlah dan kualitas petugas pendamping kredit /BDS/KKMB dalam membantu UMKM dalam mengakses kredit dan ; 8.Peningkatan peran serta aparat pemerintah dalam menyiapkan calon debitur

Peranan Bank pelaksana sebagai eksekutor kredit juga bukan merupakan masalah bila kriteria peminjam telah ditetapkan bersama oleh semua stake holder dan diumumkan kepada masyarakat. Permasalahannya mungkin baru timbul jika perbankan sebagai eksekutor kredit berjalan sendiri-sendiri berdasarkan pemikiran keamanan kredit yang akan dipinjamkan sesuai dengan pendekatan Bank sebagai lembaga yang berorientasi pada profit.

Segala kemungkinan yang akan timbul dalam pelaksanaan program ini hendaknya tidaklah dijadikan hambatan untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Sebaliknya semua pihak juga hendaknya melihat program KUR sebagai suatu solusi untuk mengatasi masalah kesulitan UMKM mendapatkan akses kepada sumber-sumber permodalan. Satu hal lagi yang perlu di kedepankan dari awal adalah adanya indikator keberhasilan yang bersifat baku dan merupakan cerminan pencapaian tujuan program. Key performance indikator ini harus disusun dari sekarang dengan memperhatikan tujuan akhir yang hendak dicapai dan bukan tujuan antaranya. Oleh sebab itu KPI yang disusun hendaknya tidak seperti sesederhana indikator keberhasilan program-program perkreditan tempo dulu yang umumnya hanya terdiri dari keberhasilan dalam penyaluran dan keberhasilan dalam pengembalian. Satu hal yang harus dimasukkan dalam indikator ini adalah kemanfaatan kredit bagi peminjam.

Oleh karena KUR merupakan kredit yang berasal dari jaminan pemerintah, maka disamping harus memikirkan kriteria peminjam, pola penyaluran dan Key performance Indicator (KPI) keberhasilannya, juga harus difikirkan lebih dulu beberapa hal yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Dengan Hypothesis bahwa program KUR berhasil baik maka beberapa pemikiran yang perlu dipersiapkan dari sekarang adalah "Bagaimana program tersebut dapat dikembangkan agar tidak hanya 9,17 % dari UMKM yang dapat menikmati, program tersebut, tetapi semua UMKM yang mengharapkan bantuan dari kebijakan pemerintah ini dapat juga merasakannya". Untuk itu yang pertama harus difikirkan adalah bagaimana cara memperluas program ini atau menciptakan program lain yang sejalan dengan program KUR. Beberapa pemikiran untuk perluasan program ini dapat dikemukakan berdasarkan beberapa kenyataan misalnya ;

- a) Menambah Jumlah bank atau tempat-tempat pelayanan bank yang terlibat dalam program KUR karena dengan jumlah bank yang dilibatkan dalam

penyaluran KUR sekarang ini, sulit diharapkan program KUR dapat diperluas dalam waktu singkat.

- b) Meningkatkan konsistensi atau kedisiplinan bank pelaksana dalam meminta agunan tambahandan secara tegas memberikan hukuman atau pinalti pada bank yang menyalahi ketentuan
- c) Mencari alternatif untuk menekan biaya transaksi baik melalui peningkatan efisien bank penyalur, maupun cara-cara lain yang layak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- d) Meningkatkan kesiapan UMKM untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan melalui berbagai cara
- e) Penambahan dana penjaminan dari pemerintah yang dikaitkan dengan ketentuan gearing ratio sebesar 10 %.
- f) Pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah terhadap bank-bank pelaksana agar tidak berlebihan dalam menempatkan dana pada SBI
- g) Peningkatan jumlah dan kualitas petugas pendamping kredit /BDS/KKMB dalam membantu UMKM dalam mengakses kredit dan ; 8.Peningkatan peran serta aparat pemerintah dalam menyiapkan calon debitur
- h) Mengawasi adanya Pengalihan kredit Bank-Bank Nasional untuk kelompok berpenghasilan rendah (yang juga sering dinyatakan sebagai UMKM) melalui berbagai Perusahaan/lembaga keuangan formal seperti Leasing menjadi penyaluran langsung kepada UMKM. Hal ini dimungkinkan sebab selama ini penyaluran cara tersebut digunakan untuk mengatasi masalah ketiadaan agunan dari UMKM sehingga UMKM dianggap tidak layak untuk meminjam langsung ke Bank. Pinjaman UMKM

atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk kredit barang (terutama barang konsumtif) seperti kredit pembelian sepeda motor, barang elektronik dan alat-alat rumah tangga dll bisa diberikan karena barang tersebut bisa langsung dijadikan agunan.

2. Prospek Kemanfaatan

Kemanfaatan pinjaman secara langsung berkaitan dengan ketepatan sasaran. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah penyaluran KUR sudah tepat sasaran ?. Walaupun dari aspek ini belum dilakukan evaluasi namun yang pasti Skim KUR sudah diarahkan pada tujuan tersebut. Hal ini diindikasikan dari : 1) tidak diberlakukannya lagi subsidi bunga : 2) besaran pinjaman yang relatif kecil. dan : 3) Skim kredit kredit mensyaratkan calon peminjam memiliki kegiatan usaha yang layak untuk dibiayai dari KUR..Ketiga ketentuan tersebut menyebabkan kelompok tertentu enggan memanipulasi sasaran kredit karena tidak akan menguntungkan bagi mereka. Dengan demikian nasabah KUR dapat diprediksikan adalah kelompok masyarakat betul-betul memerlukan pinjaman. Jumlah calon nasabah yang sesuai dengan ketentuan tersebut adalah cukup banyak (lebih kurang 43 juta unit usaha) sedangkan jumlah nasabah KUR yang ada sekarang ini (3,6 juta orang) jauh lebih sedikit dari jumlah calon nasabah potensial tersebut

Dalam hal penggunaan pinjaman Hafidz dan Sondakh (1987) dari hasil penelitiannya di 27 Propinsi di Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kelompok miskin yang memerlukan memerlukan bantuan pinjaman modal. Adalah cukup banyak. Bagi mereka jenis-jenis kredit dari bank komersial tidak mudah untuk diperoleh karena kelompok ini tidak akan mampu memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak Bank (The Five C of Credit). Hal ini juga telah dikemukakan oleh Yunus (2002) bahwa "Bank komersial mengharuskan adanya jaminan dan berbagai persyaratan administratif lainnya, yang tidak mungkin dipenuhi oleh mereka (kaum miskin). Untuk membantu rakyat miskin seharusnya stakeholder mengetahui apa-apa "Yang sangat diperlukan, adalah

bagaimana menghubungkan pekerjaan yang mereka lakukan dengan ketersediaan modal agar memungkinkan kelompok ini meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, dan memperoleh sumber pendapatan". Disini sebenarnya peran pemerintah berlaku adil untuk berpihak kepada kelompok masyarakat yang jumlahnya paling banyak (UMKM), tetapi keberpihakan tersebut sampai sekarang belum sepenuhnya dapat dioperasionalkan.

Lebih lanjut dikatakan oleh Yunus (1996) bahwa, masyarakat miskin memiliki kemampuan untuk menciptakan kekayaan sama seperti orang lain. Akses pada kredit memberikan mereka kesempatan untuk keluar dari perangkap lemahnya permodalan yang menjebak mereka dalam lingkaran setan kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty). Berikan kesempatan kepada mereka untuk mencoba kemampuannya dan menciptakan kekayaan dalam jumlah besar. Dengan pinjaman kredit, pelanggan (orang miskin) dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, dan kebanyakan juga dapat mempekerjakan seluruh keluarganya atau orang lain (mengurangi pengangguran). Dengan demikian besar kemungkinan bahwa pinjaman KUR juga telah dimanfaatkan oleh kalangan debitur untuk mengembangkan usaha mereka,

Untuk lebih meyakinkan bahwa KUR memang sudah memberikan manfaat nyata dalam mendukung pengembangan usaha UMKM memang diperlukan adanya evaluasi dan pengkajian. Evaluasi dan pengkajian idealnya diarahkan penilaian : 1) Persentase Penggunaan pinjaman untuk kegiatan produktif ; 2) Kenaikan omset atau volume usaha peminjam ; 3) kenaikan laba dari peminjam : Kenaikan jumlah penyerpan tenaga kerja dari unit usaha peminjam.

V. Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi Kebijakan

1. Kesimpulan

- 1) Dari aspek penyaluran masalah yang dihadapi dalam mengembangkan program KUR adalah : a) kurangnya kantor atau outlet bank penyalur yang mudah dijangkau oleh UMKM : b) masih adanya bank yang meminta agunan tambahan yang lebih besar dari ketentuan yang telah ditetapkan : c) Besarnya biaya transaksi kredit masih : d) Ketidaksiapan UMKM untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan : e). Keterbatasan dana penjaminan yang dialokasikan pemerintah :: f) Masih adanya kecenderungan bank untuk lebih memilih penempatan dana pada SBI dan : g) Keterbatasan jumlah dan kualitas petugas pendamping kredit untuk UMKM

- 2) Dari aspek pengembalian pinjaman kinerja program KUR belum diketahui karena belum tersedianya data akurat untuk tingkat nasional yang bisa dijadikan bahan evaluasi atau bahan kajian

- 3) Dari aspek pemanfaatan dana juga belum pernah dilakukan evaluasi apakah penyaluran KUR sudah tepat sasaran dan sudah dimanfaatkan oleh para peminjam dengan baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan beberapa tolok ukur antara lain : 1) Persentase Penggunaan pinjaman untuk kegiatan produktif ; 2) Kenaikan omset atau volume usaha peminjam ; 3) kenaikan laba dari peminjam : Kenaikan jumlah penyerpan tenaga kerja dari unit usaha peminjam.

- 4) Potensi Pengembangan program KUR dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :
 - a) Jumlah Nasabah KUR baru 10,49 % dari jumlah UMKM yang ada di Indonesia, sedangkan jumlah UMKM yang memerlukan Pinjaman KUR diperkirakan mencapai 87,34 % dari jumlah UMKM atau ada sebanyak 42,976 unit usaha dengan demikian ada sekitar 39,196 juta unit usaha lagi yang belum mendapatkan pinjaman KUR.

- b) KUR merupakan model perkreditan yang inovatif didasarkan pada permasalahan riil yang dihadapi UMKM dalam mengakses perodalan. Ciri inovatif KUR ditandai dengan : (1) Adanya jaminan dari Pemerintah dan rendahnya bunga kredit : (2). Prosedur Penyaluran Relatif Mudah ; (3). Bersifat kredit umum : (4) Ketersediaan Infra Struktur yang cukup banyak
- 5) Penilaian KUR dari aspek ketepatan sasaran dan manfaatnya bagi peminjam belum lagi diukur oleh sebab itu belum dapat disimpulkan
- 6) KUR tetap merupakan program perkreditan yang sangat prospektif untuk dikembangkan dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM untuk itu berbagai masalah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini perlu sesegera mungkin diselesaikan

2. Saran

- 1) Berkaitan dengan kemampuan diperlukan : a) adanya tambahan bank penyalur dan atau kantor/outlet bank penyalur yang mudah dijangkau oleh UMKM : b) pengawasan yang lebih ketat terhadap bank-bank penyalur agar tidak meminta agunan tambahan yang lebih besar dari ketentuan yang telah ditetapkan ; c) penekanan biaya transaksi kredit atau penambahan alokasi biaya transaksi dari sumber-sumber resmi yang layak dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ::d) Mempersiapkan UMKM untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan : e).Penambahan dana penjaminan yang dialokasikan pemerintah :: f) Pengawasan terhadap bank-bank penyalur agar tidak lebih mengutamakan penempatan dana pada SBI dan : g) Keterbatasan jumlah dan kualitas petugas pendamping kredit untuk UMKM
- 2) Dari aspek pengembalian pinjaman perlu dilakukan : a) Evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan ; b) Penagihan terhadap nasabah

penunggak ; c) Penyuluhan kepada seluruh nasabah KUR tentang kepentingan pengembalian kredity untuk kelangsungan pelaksanaan KUR

- 3) Dari aspek pemanfaatan dana perlu dilakukan evaluasi kajian komprehensif untuk mengetahui sejauh mana program KUR telah tepat sasaran dan dimanfaatkan bagi para peminjam. Penilaian ini dapat dilakukan dengan beberapa tolok ukur antara lain : 1) Persentase Penggunaan pinjaman untuk kegiatan produktif ; 2) Kenaikan omset atau volume usaha peminjam ; 3) kenaikan laba dari peminjam : Kenaikan jumlah penyerpan tenaga kerja dari unit usaha peminjam.
- 4) KUR merupakan model perkreditan yang inovatif yang diduga sangat bermanfaat bagi UMKM dalam rangka pengembangan modal UMKM untuk mendukung peningkatan produksi dan pendapatan. UMKM. Oleh sebab itu program ini harus dipertahankan dan dikembangkan oleh Pemerintah dan kalangan Stakeholder lainnya dengan mengatasi semua masalah yang menjadi kendala dalam pengembangan program tersebut

Daftar Bacaan

Anonymus (2006) : Annual Report Bank Indonesia 2006. Bank Indonesia Jakarta.

----- Presiden Meresmikan Program Kredit Usaha Rakyat untuk mempercepat Proses Pemberdayaan UMKM. (Harian Republika Tanggal 8 November 2007). Jakarta

----- Kajian Pemanfaatan Bantuan Perkuatan Untuk Usaha Mikro Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya Koperasi dan UKM Kementerian Negara Koperasi Dan UKM. Jakarta

Achmad Junaidi 2011. Penurunan ATMR Akan Lenih Mendorong Bank Umum Dalam Menyalurkan Kredit Kepada UMKM. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM dan Koperasi Kementerian Ko dan UKM Jakarta

Anwar Hafiz dan Luky Sondagh 1987 : Penelitian kelembagaan kredit pedesaan. Lembaga Penelitian dan pengembangan Perbankan Indonesia Jakarta

Muhammad Yunus 1986 : Grameen Bank memberikan pinjaman untuk Memodali usaha Orang miskin. World Bank.

Syarifuddin Hasan 2010.: Penyaluran KUR tahun 2010 melebihi target. Situs Resmi Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta

Jakarta, 10 Januari 2011. 01-08

Teuku Syarif.